



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Renny Novsellia Sihite¹, Holiawati²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
Tangerang Selatan

rennynovselia72@yahoo.com¹, holiawati_76@yahoo.co.id²

Abstract. *This research aims to obtain evidences empirically about the influence of the implementation of government accounting standards, internal control systems and accounting staff competence to the quality of local government financial statements. The population in this research is staff members of SKPD in South Tangerang City. This research is a quantitative research that conduct by using primary data. This research using simple random sampling technique, and samples obtained and used amounted to 100 respondents. The data collection were done by using questionnaire method. The method of analysis used in testing the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results that the application of government accounting standards, internal control system and accounting staff competence partially have the positive effect and significant on the quality of local government financial statements. Thus, the application of government accounting standards, internal control system and accounting staff competence simultaneously have positive effect and significant on the quality of local government financial statements.*

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards; Internal Control System; Accounting Staff Competence and Quality of Local Government Financial Statements.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, dan sampel yang didapatkan dan digunakan berjumlah 100 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai staf bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Pengendalian Internal; Kompetensi Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Corresponding author. rennynovselia72@yahoo.com, holiawati_76@yahoo.co.id

How to cite this article. Sihite, Holiawati. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 9 (2), 81-92

History of article. Received: September 2017, **Revision:** November 2017, **Published:** Desember 2017

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Akuntansi keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007:1). Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terlebih di era globalisasi dunia, ditandai dengan munculnya kesepakatan ekonomi regional diantaranya disetujuinya pembentukan masyarakat ekonomi Asean (Asean Ecomony Community) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah menuntut pemerintahan pusat ataupun daerah untuk menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya aturan ini maka pemerintahan pusat atau daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.

Permasalahan ini pula dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu usaha untuk mewujudkan penerapan standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk, isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan selain menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas juga diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pengendalian Internal dilakukan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan

pemborosan serta memaksimalkan efisiensi, ekonomis serta efektivitas kinerja organisasi atau instansi pemerintah. Pada kenyataannya, kinerja organisasi seringkali terjadi penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparatur pemerintahan, dan hal ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan juga mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2008. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peneliti sebelumnya telah banyak membahas pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitiannya, Ni Luh Nyoman (2014) menyatakan bahwa secara empiris membuktikan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di SKPD pada Kabupaten Buleleng.

Heni dan Euis (2014) menyatakan bahwa aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

KAJIAN LITERATUR

Theory Agency

Sebuah teori dibangun untuk menjelaskan, memahami dan memprediksi hubungan antara beberapa variabel. Teori adalah sebuah konstruksi dari sebuah model realitas yang diduga saling berhubungan secara koheren. Baumann (2001) berpendapat bahwa sebuah teori yang baik memiliki ciri sederhana (parsimony), memiliki ketepatan dalam prediksi (accuracy), dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai bidang kehidupan (verifiability).

Secara umum, teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang membuat kontrak, dana gen sebagai pihak yang menerima wewenang. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah suatu kontrak di mana satu orang atau lebih, yang kemudian disebut sebagai principal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang lain atau lebih, yang kemudian disebut agent untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan

bagi kepentingan principal. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi.

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang. Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah. Teori keagenan ini telah dipraktikan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia terutama sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah.

Mardiasmo (2002:20) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif atau agen cenderung memaksimalkan self interest-nya dan kewenangannya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan-keputusan, sampai dengan melaporkan dan menyajikan laporan keuangan yang sewajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk posisinya di mata legislatif dan rakyat. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah khususnya wajib mengikuti serta menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangannya dan perlu adanya pengendalian internal disetiap satuan kerja perangkat daerah yang didukung dengan kompetensi staf akuntansinya.

Pengertian Audit (Pemeriksaan) Sektor Publik

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 1 butir (5), pemeriksaan didefinisikan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Secara umum, pemeriksaan atau auditing merupakan proses investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan/audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau instansi pengelola aktiva negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen ini bertujuan menyatakan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang menyatakan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini. (Indra Bastian, 2007:2).

Murwanto, Adi dkk (2007:3) dalam bukunya Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah menyebutkan pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan: (1) Terdiri dari beberapa kegiatan; (2) Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya; (3) Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; (4) Pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya.

Audit sektor publik merupakan bentuk tanggungjawab sektor publik untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah

digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana sesuai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku sehingga mendukung terciptanya value for money (3E) dan good governance. Selain itu audit sektor publik digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis dan efektif.

Jenis-Jenis Auditor Sektor Publik

Oleh karena itu, sebagian pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

Auditor Internal

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi auditi. Pengertian organisasi auditi dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Organisasi auditi misalnya adalah pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati atau Walikota. Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati, walikota, gubernur, menteri atau presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

Auditor Eksternal

Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi auditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia,

peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya.

Opini Audit Sektor Publik

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (UU No. 15 Tahun 2004).

Artinya opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Menurut Indra Bastian (2007:194) terdapat lima jenis opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dalam hal ini LKPD. Kelima jenis opini tersebut adalah:

Unqualified Opinion (Opini Wajar Tanpa Pengecualian)

Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit, tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain

klien, pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor. Pendapat wajar mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketepatan penggolongan informasi. Kewajaran penyajian laporan keuangan tentang posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar.

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan.

Disclaimer of Opinion (Tidak Memberikan Pendapat)

Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. (Bastian, 2007:196) Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh

otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai auditor memberikan pendapat, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan auditor, yaitu: (1) Pada paragraf pengantar, auditor mengubah frasa dari “Kami telah mengaudit neraca perusahaan...” menjadi “Kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan...”. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. (2) Pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit, karena pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. (3) Dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Definisi kualitas menurut Mulyana (2010:96) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh dari pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teori terhadap rumus masalah penelitian, belum jawaban secara empiris. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Peneliti sebelumnya yaitu Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin diterapkan dan direalisasikan standar akuntansi pemerintah tersebut akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan.

H1: Diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan tingkat nilai signifikan dibawah 0.05

Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal adalah menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada, melindungi harta Pemerintah Daerah, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Unsur sistem pengendalian internal merupakan dasar untuk penyelenggaraan dan sebagai tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian

internal. Unsur sistem pengendalian internal dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti dkk dalam penelitiannya di Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menyatakan bahwa jika adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin membaik. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menguji ulang kembali hubungan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan

H2: Diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan tingkat nilai signifikan dibawah 0.05

Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi staf akuntansi merupakan faktor pendukung terciptanya Laporan Keuangan yang berkualitas, karena pegawai yang memiliki kompetensi yang baik dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Dalam penelitian Iftiah Dian Humairoh menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Bahwasannya faktor kompetensi sumber daya manusia bagian Pejabat Penatausahaan Keuangan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara Kompetensi Staf Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

H3: Diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan tingkat nilai signifikan dibawah 0.05

Selain pengujian secara parsial, penulis juga melakukan pengujian secara simultan tentang pengaruh ketiga variabel bebas tersebut

terhadap variabel terikat, yaitu menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti dkk dalam penelitiannya menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka peneliti bertujuan melakukan pengujian kembali atas hipotesis tersebut.

H4: Diterima apabila nilai Fhitung > Ftabel dengan tingkat nilai signifikan dibawah 0.05.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu peneliti berusaha mencoba karakteristik tertentu dari fenomena yang menjadi pusat perhatian. Dengan didukung dengan beberapa penelitian

serta teori yang memadai, peneliti selanjutnya akan mengumpulkan data yang mendukung lalu mengolahnya dengan instrument (alat ukur) yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2016:13). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai staf bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini populasi SKPD yang terdapat di Kota Tangerang Selatan dari 38 SKPD yaitu 5.058 pegawai, penentuan sampel menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke instansi dan membagikan kuesioner ke instansi terkait yang menggunakan Skala Likert.

Untuk mengukur peneliti menggunakan Skala Likert berkala 5 dengan skor sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Likert untuk Kuesioner

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Nadhiroh (2010)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh antara variabel terikat terhadap variable bebas dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik. Pada penelitian ini digunakan alat bantu program IBM *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 22.

Uji yang dilakukan adalah stastistik deskriptif, uji Kualitas data yaitu uji validitas, Uji Koefisien Korelasi (R), Uji Koefisien Determinasi, Uji T dan Uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan Ahsani (2015) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan dengan baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, sehingga kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan Pemerintah Daerah semakin baik pula. Standar Akuntansi Pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan diterapkan di

setiap SKPD untuk terus mencapai mutu dan kualitas yang baik, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa ada transparansi dan kinerja yang baik di setiap SKPD. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting dalam mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti et. al (2014) bahwa Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, tingkat penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan tinggi dan diterapkan sangat baik pada karyawan yang ada terkhusus pada karyawan yang ada di bagian keuangan seperti KasuBag, Staf Keuangan, Pelaksana dan Bendahara, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Tangerang Selatan.

Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh T. Asri Yunita (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh staf akuntansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) mengemukakan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya maka tugas yang dibebankan kepada sumber daya manusia (staf

akuntansi) tersebut akan dilaksanakan dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. Maka dapat dikatakan bahwa kompetensi staf akuntansi dalam hal ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik kompetensi yang dimiliki staf akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jadi dapat disimpulkan Kompetensi Staf Akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan penting untuk memperoleh Kualitas Laporan Keuangan yang baik.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk (2014) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang didapatkan. Jadi dapat disimpulkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi yang ada di setiap SKPD pada Kota Tangerang Selatan telah baik sehingga Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi baik pula.

SIMPULAN

Mendapatkan bukti empiris atas pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan penelitian ini. Dari uraian dan pembahasan tersebut maka pada bagian

akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan uji analisis data, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian Jannaini (2012) dan Kusumah (2012) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Terdapat pengaruh secara signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Windiastuti (2013), Nurillah dan Muid (2014), Putri,dkk (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (4) Terdapat pengaruh secara signifikan antara kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Roviyantie (2012) yang membuktikan bahwasanya kompetensi staf akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (5) Terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk (2014) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed Riahi, Belkaoui. 2000. Teori Akuntansi Edisi ke Empat. Jakrta: Salemba Empat

Baridwan, Zaki. 2005. *Intermediet Accounting*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Bastian, Indra. 2005. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat

Bastian, Indra. 2010. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Baumann, C., M. Bauman dan R. Halsey. 2001. *Do Firm Use Deferred Tax Asset Valuation Allowance to Manage Earnings? The Journal of the American Taxation Association 23 (Supplement)*

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Governmental Accounting Standard Board (GASB) Concept Statement No. 1. 2007. *Objectives of Financial Reporting*. New York.

Hamid, Abdul. 2010. *"Buku Panduan Penulisan Skripsi"*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Halim, Abdul dan Muhammad Syamm Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba. 2007.

Halim, Abdul dkk. *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat. 2007

Heni Nurani H dan Euis Eti Sumiyati, (2014) "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)"

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta:Salemba Empat.

- Irawan, Rudi (2012). “Pengaruh Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan Telekomunikasi Yang Go Public di BEI Periode 2006-2011”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 7 No. 2, November 2005: 148-162.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, PP. 305-360.*
- Mahmudi. 2006. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Masmudi. 2003. *Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1.
- Mulyana Deddy, M.A., Ph.D. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda
- Murwanto Rahmadi, Adi Budiarmo, dkk. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instransi Pemerintah.* Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI. 2007.
- Nadhiro, Siti Asih (2010) “Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan dan Self- Efficacy terhadap Kinerja Auditor dalam Pembuatan Audit Judgment (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)”. UNDIP : Semarang. (Skripsi Dipublikasikan)
- Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti at.el, (2014) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)”
- Nugraeni, dan M. Budiantara, 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis.
- Nurendah R.U, (2015) “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”
- Spencer, Peter M., & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work “Models for Superior Performance”.* New York: Jhon Wiley & Sons Inc
- Stice, James D, Earl K. Stice, K. Fred Skousen. 2009. Akuntansi Keuangan. Edisi Ke Enam Belas. Diterjemahkan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- T. Asri Yunita, (2015) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kota Dumai)”

Yusup Komarudin, (2013) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung)”

,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah dalam*

peranan dan tujuan pelaporan keuangan.

,Undang-Undang Nomor 03 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

,Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.

,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

,Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.